

LAKIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN 2019



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan focus pada upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 diwajibkan untuk menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI

1.2.1 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerastera tata kerja Dinas komunikasi, informatika, statistik, dan persandian provinsi sulawesi selatan tanggal 28 Desember 2016 Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

b. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan dinas.

(1) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

(2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang,

urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.

- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

c. Bidang Komunikasi Publik

Bidang Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis komunikasi public.

- (1) Seksi Pengelolaan Opini Publik dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi Publik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan opini public.
- (2) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi Publik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- (3) Seksi Infrastruktur dan Teknologi Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi Publik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan teknologi komunikasi.

d. Bidang Informatika

Bidang Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Informatika.

- (1) Seksi Layanan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Informatika dalam melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis layanan Informasi Publik
- (2) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Informatika dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan integrasi sistem informasi.

(3) Seksi Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Komunikasi Publik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sumber daya manusia dan hubungan kerjasama antar Lembaga.

e. Bidang Statistik Sektoral

Bidang Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis statistic sectoral.

(1) Seksi survey dan kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik Sektoral dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis survey dan kompilasi produk administrasi statistik sectoral.

(2) Seksi Koordinasi dan Kerjasama Statitik Sektoral dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik Sektoral dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis koordinasi dan kerjasama statistic sectoral.

(3) Seksi Evaluasi dan Analisis, Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Statistik Sektoral dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis evaluasi dan analisis, diseminasi layanan statistic sectoral.

f. Bidang Persandian

Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis persandian.

(1) Seksi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis tata kelola persandian

(2) Seksi Operasional Pengamanan Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian dalam

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengamanan persandian.

- (3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

g. Bidang e-Government dan Pengelolaan Data

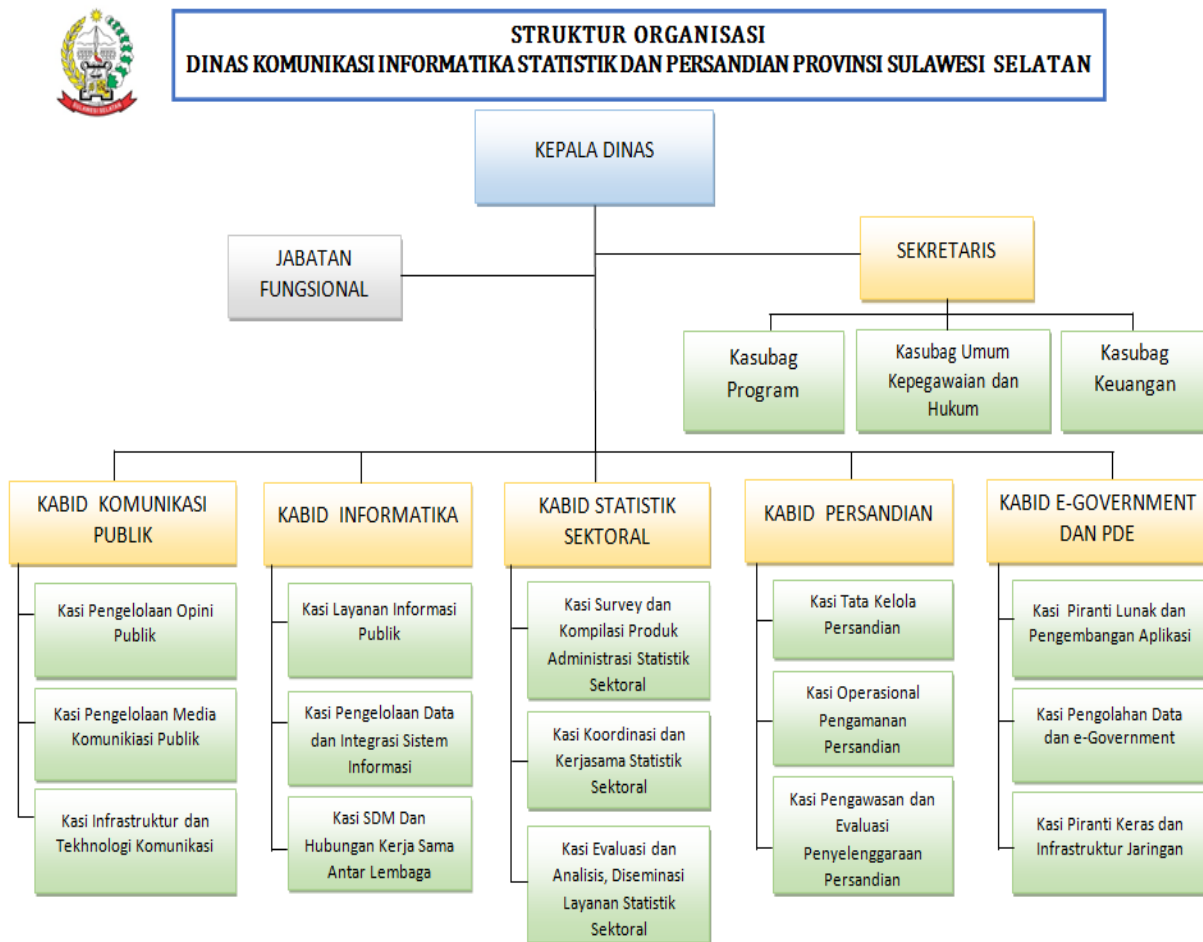
Bidang e-Government dan Pengelolaan Data dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoodinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis e-Government dan Pengelolaan data.

- (1) Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang e-Government dan Pengelolaan Data dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis piranti lunak dan pengembangan aplikasi.
- (2) Seksi Pengelolaan Data Informasi dan e-Government dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang e-Government dan Pengelolaan Data dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data informasi dan e-Government.
- (3) Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang e-Government dan pengelolaan data dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis piranti keras dan infrastruktur jaringan.

h. Jabatan fungsional

- (1) Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Dinas dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.1



1.2.3 ISU-ISU STRATEGIS

Keberhasilan suatu instansi bergantung pada bagaimana instansi itu sendiri merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu-Isu Strategis yang melingkupi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut.

- Keterbukaan Informasi yang belum sepenuhnya terlaksana
- Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik
- Maraknya berita Hoaks
- Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah masih belum maksimal
- Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat cepat
- Adanya Program Satu Data Indonesia

1.2.4 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

a. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan harus didukung oleh SDM yang kompeten dan berkualitas. Jumlah Pegawai di Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebanyak 90 orang dengan tingkat Pendidikan bervariasi. Adapun Jumlah ASN berdasarkan tingkat Pendidikan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

Tingkat Pendidikan	Jumlah ASN
SLTP	2 Orang
SLTA	16 Orang
DIII/DIV	4 Orang
S1	47 Orang
S2	20 Orang

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat Pendidikan ASN di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian didominasi oleh lulusan Sarjana S1 dan S2.

Sedangkan tingkat kepangkatan dan golongan ASN pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Tingkat Kepangkatan dan Golongan ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

GOLONGAN	JUMLAH
IV/d	-
IV/c	1
IV/b	5
IV/a	10
III/d	30
III/c	10
III/b	12

III/a	10
II/d	3
II/c	3
II/b	4
II/a	-
I/d	1
I/c	-
I/a	1

Tabel 1.3 Jumlah ASN berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Eselon II	1	-	1
Eselon III	6	-	6
Eselon IV	7	8	15
Pejabat Fungsional Umum	24	40	64
Arsiparis	3	-	3
Total	41	48	89

b. Sarana dan Prasarana Pendukung

Saat ini asset-aset yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berada dalam keadaan baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.3 Jumlah ASN berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan / Kondisi
1	Alat-Alat Angkutan	22	Baik
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	Baik
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	905	Baik
4	Alat Studio dan Alat Komunikasi	221	Baik
5	Bangunan Gedung	1	Baik
6	Jaringan	3	Baik
7	Buku Umum	84	Baik

c. Keuangan

Dukungan dana dan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2019 berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Anggaran Pokok yang dialokasikan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebesar **Rp 31.015.185.542,00** dengan rincian belanja tidak langsung sebesar **Rp 12.316.250.412,10** dan belanja langsung sebesar **Rp 18.698.935.130,00** yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Sedangkan pada Triwulan ke-IV, terdapat pengurangan anggaran pada belanja tidak langsung sebesar **Rp 886.766.863,10** menjadi **Rp 11.429.483.549,00** dan penambahan anggaran pada belanja langsung sebesar **Rp 1.293.408.587,10** menjadi **Rp 19.992.343.717,10**. Belanja langsung yang berasal dari APBD mendukung pelaksanaan 10 Program dan 60 Kegiatan.

1.2.5 TANTANGAN DAN PELUANG

a. Tantangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi dan diuraikan sebagai berikut.

- 1) Keterbatasan kewenangan provinsi
- 2) Belum adanya *Disaster Recovery Plan*;
- 3) Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif;
- 4) Kurangnya koordinasi dalam penyusunan program;
- 5) Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika;
- 6) Regulasi kewenangan belum terimplementasikan;
- 7) Keterbatasan kapasitas sumber daya;
- 8) Belum bakunya pola arus data informasi antar instansi;
- 9) Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi;
- 10) Keterbatasan anggaran;
- 11) Belum menjadi prioritas dalam jangka pendek;
- 12) Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki.

b. Peluang

Selain tantangan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga mempunyai peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara :

- 1) Telah tersusunnya master plan IT Prov. Sulsel
- 2) Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan komunikasi dan informatika
- 3) Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap penerapan e-Government
- 4) Bimtek SPSE yang terus menerus
- 5) Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- 6) Adanya fasilitas bantuan perangkat server dari LKPP
- 7) Kebutuhan organisasi yang semakin meningkat
- 8) Komitmen semua unsur Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas.

1.2.6 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber daya organisasi, dan sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-

tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Pada bagian ini disajikan juga inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang belum ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN



BAB 2

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

1.3 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Rencana strategis diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun sebagai langkah perjalanan Rencana Strategis Organisasi Satuan Perangkat Kerja Daerah yang di Break Down dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan (2018-2023) yang telah memuat tujuan, kebijakan, program, pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan Renstra Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 diarahkan sebagai langkah akselerasi dan mensinergikan perencanaan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.

2.1.1 VISI

Visi misi Gubernur Sulawesi Selatan pada perencanaan periode 2018-2023 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Dalam RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 tertuang visi Gubernur Sulawesi Selatan yaitu :

“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni, inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemakan provinsi Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”, “terkoneksi”, “mandiri dan sejahtera”, “sehat dan cerdas” serta “berkarakter”. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 yaitu:

- Inovatif*** : Kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru dan layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Kompetitif*** : Kemampuan menghasilkan SDM, Produk Barang dan Jasa yang mampu terserap oleh pasar.

Produktif : Kemampuan untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inklusif : Kondisi sistem dan lingkungan yang ramah untuk semua tanpa hambatan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat tanpa kecuali.

Berkarakter : Spirit Pembangunan berdasarkan agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

2.1.3 MISI

Pencapaian Visi Kepala Daerah dalam RPJMD diwujudkan dalam 5 misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Penjelasan dari setiap misi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penjelasan Misi Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang responsive dan inklusif dengan berbasis pada inovasi	Inovatif dan Inklusif
2	Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel	Membangun Infrastruktur dalam menguatkan inter-konektivitas antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir	Produktif dan Inklusif
3	Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif	Mengembangkan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah	Produktif
4	Mewujudkan kualitas Manusia yang kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	Memenuhi akses Pendidikan berkualitas dan penguasaan ipteks tanpa hambatan bagi seluruh warga, menjamin akses layanan kesehatan ber-kualitas tanpa hambatan bagi	Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter

		seluruh warga, serta mendorong pelestarian dan kemajuan kebudayaan daerah	
5	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang berkelanjutan	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Kompetitif

Dari 5 (lima) misi Pembangunan Gubernur Sulawesi Selatan yang telah dijelaskan di atas, yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Misi ke-1 yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif.**

2.1.4 TUJUAN DAN SASARAN

Misi ke-1 Gubernur Sulawesi Selatan yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif** selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui pemanfaatan TIK	Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah
2	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui pemanfaatan TIK	Terwujudnya integrasi data statistik sektoral	Cakupan Ketersediaan data statistik sektoral
3	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui pemanfaatan TIK	Terwujudnya Fungsi Identifikasi, Proteksi, Penanggulangan dan Pemulihan di Bidang Keamanan Informasi yang Efektif dan Efisien	Persentase perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah
4	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan	Nilai Sakip OPD

		Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) %ASN Nilai SKP Kategori Baik
--	--	---------------------------------------	--

2.1.5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi dan kebijakan dari organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1) Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Melalui Pemanfaatan TIK	(1) Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (2) Terwujudnya Integrasi Data Statistik Sektoral (3) Terwujudnya fungsi Identifikasi, Proteksi, Penanggulangan dan Pemulihan di Bidang Keamanan Informasi yang Efektif dan Efisien	(1) Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi serta mempermudah Akses Informasi Publik (2) Standarisasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Data Statistik Sektoral Skala Provinsi / Kabupaten / Kota (3) Pembangunan dan Penerapan fungsi Identifikasi, Proteksi, Penanggulangan dan Pemulihan di Bidang Keamanan Informasi	(1) Mewujudkan ketersediaan dan Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika untuk mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah (1) Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan TIK (2) Satu Data dalam Mendukung Infrastruktur dan Tata Kelola Penyelenggaraan Statistik (3) Meningkatkan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Keamanan dan Sarana Pendukung Keamanan Informasi
(2) Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	(4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan & Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	(4) Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah & Sumber Daya Manusia Aparatur	(4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Koordinasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

1.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksudkan sebagai alat ukur yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan dan sasaran atau sasaran dari kegiatan utama. Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU), diharapkan untuk mendapatkan informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan **Nomor : 188.34/13/Diskominfo-SP** tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 2.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Terwujudnya tertib Administrasi yang efektif dan Efisien pada Diskominfo-SP di Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai Lakip OPD berdasar hasil Penilaian inspektorat Prov. Sulsel	Nilai Akhir penjumlahan Komponen menjadi nilai tingkat akuntabilitas instansi yang dinilai : AA (>85-100) adalah memuaskan A (>75-85) adalah sangat baik B (>65-75) adalah baik CC (>50-65) adalah cukup (memadai) C (>30-50) adalah kurang D (0-30) adalah sangat kurang	Sekretariat
Meningkatnya kualitas layanan data dan informasi publik	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah Data dan Informasi Statistik sektoral yang tersedia}}{\text{Jumlah data dan informasi yang menjadi urusan pemda}} \times 100\%$	Bidang Statistik Sektoral
Meningkatnya Pemanfaatan TIK dalam pelayanan Publik	- Jumlah layanan pemerintah provinsi melalui pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah layanan pemerintah provinsi melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi	Bidang e-Government dan Pengolahan Data dan LPSE
	- Persentase Pengelolaan Informasi Publik	$\frac{\text{Jumlah informasi yang disediakan OPD}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Prov. Sulsel}} \times 100\%$	Bidang Informatika
	- Persentase Penyelenggaraan Komunikasi Publik	$\frac{\text{Jumlah informasi yang disediakan OPD}}{\text{Jumlah Informasi yang disebarakan}} \times 100\%$	Bidang Komunikasi Publik

Terwujudnya Pengamanan Informasi Publik	- Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian	Jumlah perangkat daerah yang Menggunakan persandian dalam Komunikasi antar perangkat daerah Jumlah Perangkat Daerah Prov. Sulsel	x100%	Bidang Persandian
---	---	---	-------	-------------------

Berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah mengukur pencapaian masing-masing indikator di akhir Tahun Anggaran 2019. Hasil capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 2.5 Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	HASIL CAPAIAN	SUMBER DATA
Terwujudnya tertib Administrasi yang efektif dan Efisien pada Diskominfo-SP di Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai Lakip OPD berdasar hasil Penilaian inspektorat Prov. Sulsel	55 %	55 %	Sekretariat
Meningkatnya kualitas layanan data dan informasi publik	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	40 %	40 %	Bidang Statistik Sektoral
Meningkatnya Pemanfaatan TIK dalam pelayanan Publik	- Jumlah layanan pemerintah provinsi melalui pemanfaatan teknologi informasi	80 %	80 %	Bidang e-Government dan Pengolahan Data dan LPSE
	- Persentase Pengelolaan Informasi Publik	70 %	70 %	Bidang Informatika
	- Persentase Penyelenggaraan Komunikasi Publik	40 %	40 %	Bidang Komunikasi Publik
Terwujudnya Pengamanan Informasi Publik	- Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian	30 %	30 %	Bidang Persandian

1.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan Anggaran atau DPA. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019 yaitu :

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Fungsi Identifikasi, Proteksi, Penanggulangan dan Pemulihan di Bidang Keamanan Informasi yang Efektif dan Efisien	Persentase perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	30 %
2	Terwujudnya integrasi data statistik sektoral	Cakupan Ketersediaan data statistik sektoral	40 %
3	Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah	62 %
4	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	50 %
		Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	100 %
		%ASN Nilai SKP Kategori Baik	90 %

1.6 Rencana Anggaran Tahun 2019

Anggaran program kegiatan BAPPEDA DIY pada tahun anggaran 2017 yang bersumber Dari APBD Sebesar Rp 31. 015.185.542,10 Terdiri Dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 12.316.250.412,10 dan Belanja Langsung sebesar Rp 18.698.935.130,00. Melalui mekanisme perubahan, anggaran belanja APBD yang dikelola menjadi sebesar Rp 31.421.827.266,18 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 11.429.483.549,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 19.992.343.717,18.

1.7 Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2019, digunakan instrument-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

2.5.1 Baruga Layanan Masyarakat

Baruga Layanan masyarakat merupakan layanan yang dihadirkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk menampung saran maupun kritik ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui social media dan aplikasi baruga.

Manfaat dari Baruga Layanan Masyarakat ini yaitu mendapatkan informasi langsung dari Masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat, menjadi wadah satu pintu terhadap laporan, keluhan dan aspirasi masyarakat serta memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan public.



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

1.8 Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Pengukuran Kinerja mencakup antara lain :

- a) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
- b) Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk kategorisasi kinerja (Penentuan Posisi) yang sesuai dengan tingkat capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

1.9 Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2019
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	Kode
1	Terwujudnya Fungsi Identifikasi, Proteksi, Penanggulangan dan Pemulihan di Bidang Keamanan Informasi yang Efektif dan Efisien	Persentase perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	30 %	30 %	100 %	Sangat Baik
2	Terwujudnya integrasi data statistik sektoral	Cakupan Ketersediaan data statistik sektoral	40 %	40 %	100 %	Sangat Baik
3	Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah	62 %	62 %	100 %	Sangat Baik
4	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	50 %	50 %	100 %	Sangat Baik
		Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik
		%ASN Nilai SKP Kategori Baik	90 %	90 %	100 %	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Pada tahun 2019, indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan dari total indikator dengan persentase capaian sebesar 100 % atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada masing-masing indikator sasaran strategis berada pada level **Sangat Baik** dengan nilai **91 ≤ 100**.

Terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Bidang E-Government, Bidang Komunikasi Publik, Bidang Informatika, Bidang Statistik, Bidang Persandian dan Sekretariat. Program-program yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 yaitu :

- a. Program Pengembangan dan Implementasi e-Government (Prioritas)
- b. Program Pengembangan Baruga Layanan Publik (Prioritas)
- c. Program Pengelolaan Informasi Publik
- d. Program Pengelolaan Komunikasi Publik
- e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- g. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- h. Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral
- i. Program Pemanfaatan Persandian dan Pengamanan Informasi

1.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2019, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian secara bertahap telah berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui 2 (dua) tujuan strategis dan 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya berdasarkan tujuan strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya
berdasarkan tujuan strategis**

No	Tujuan Strategis	Indikator Tujuan	Realisasi	2019			Kode
			2018	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	% Implementasi e-Government dalam mengatur Dimensi Tata Kelola, Infrastruktur, Aplikasi, Data,	50 %	62 %	62 %	100 %	Sangat Baik

	Melalui Pemanfaatan TIK	Keamanan Informasi dan SDM					
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	45 %	50 %	50 %	100 %	Sangat Baik

Sedangkan untuk perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya berdasarkan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya berdasarkan sasaran strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi	2019			Kode
			2018	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	Pengelolaan informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi selatan	Persentase pengelolaan komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah	50 %	62 %	62 %	100 %	Sangat Baik
2	Terwujudnya Integrasi Data Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	38 %	40 %	40 %	100 %	Sangat Baik
3	Terwujudnya Fungsi Identifikasi, Proteksi, Penanggulangan dan Pemulihan di Bidang Keamanan Informasi yang Efektif dan Efisien	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	25 %	30 %	30 %	100 %	Sangat Baik
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan & Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	40 %	50 %	50 %	100 %	Sangat Baik
		Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	100 %	100 %	100 %	100 %	Sangat Baik
		% ASN Nilai SKP Kategori Baik	90 %	90 %	90 %	100 %	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki 2 (dua) tujuan strategis dan 4 (empat) sasaran strategis. Tabel di atas menunjukkan bahwa progres pencapaian target realisasi kinerja baru dimulai

pada tahun 2019 karena tahun 2019 merupakan tahun pertama berjalannya RPJMD 2018-2023. Sementara pada tahun 2018 memiliki tujuan dan sasaran strategis yang berbeda.

1.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Realisasi kinerja tahun 2019 sudah tertuang dalam target jangka menengah dalam dokumen perencanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Sasaran Strategis	TARGET RENSTRA (%)					Realisasi Tahun 2019
					I	II	III	IV	V	
1	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Melalui Pemanfaatan TIK	% Implementasi e-Government dalam mengatur Dimensi Tata Kelola, Infrastruktur, Aplikasi, Data, Keamanan Informasi dan SDM	Pengelolaan informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi selatan	Persentase pengelolaan komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah	62	70	79	88	97	62 %
			Terwujudnya Integrasi Data Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	40	50	65	70	90	40 %
			Terwujudnya Fungsi Identifikasi, Proteksi, Penanggulangan dan Pemulihan di Bidang Keamanan Informasi yang Efektif dan Efisien	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	30	50	60	70	80	30 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan & Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	50	75	75	100	100	50 %
				Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	100	100	100	100	100	100 %
				% ASN Nilai SKP Kategori Baik	90	90	95	95	98	90 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi untuk setiap sasaran strategis di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah mencapai target tahun pertama yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis 2018-2023.

1.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Dokumen perencanaan Rencana Strategis selama 5 (lima) tahun ke depan tetap mempunyai kaitan dengan program yang terdapat dalam dokumen perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, penentuan indikator tujuan, Sasaran, program maupun penentuan kegiatan yang dilaksanakan belum mengikuti standar nasional karena belum ditetapkannya petunjuk teknis mengenai standar nasional dan masih dalam pembahasan di level pusat.

1.13 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dikatakan berhasil dalam pencapaian indikator tujuan dan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai dikarenakan ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui perencanaan program dan kegiatan yang tepat dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam hal implementasi e-government di lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut didukung anggaran yang memadai melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal yang lain yang juga mendukung keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Kinerja seluruh ASN dan Non ASN yang berada di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan komitmen dan penuh rasa tanggung jawab sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2019 hampir tidak ada, walaupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat beberapa kendala, akan tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil sehingga tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan terhadap program dan kegiatan baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum terlaksana serta kendala-kendala yang dihadapi
- Memberi Reward/Penghargaan bagi ASN yang berkinerja baik serta kegiatan dengan pencapaian terbaik dan Punishment/teguran bagi ASN menurun kinerjanya serta kegiatan dengan pencapaian yang rendah sebagai upaya untuk mendorong kinerja dalam pelaksanaan kegiatan
- Melakukan Koordinasi baik ditingkat daerah maupun pusat agar terjadi keselarasan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
- Menambah dan memelihara sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

1.14 Analisis Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya juga merupakan penunjang untuk mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber Daya yang dimaksud berupa :

- Sumber Daya Manusia yang Kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Analisis penggunaan sumber daya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Kebutuhan Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan Pegawai dalam Analisis Jabatan	Jumlah SDM belum sesuai dengan Kebutuhan Pegawai dalam Analisis Jabatan karena belum adanya mutasi pegawai dan adanya beberapa pegawai yang pensiun	Masih dibutuhkan SDM dalam hal ini ASN yang mempunyai kompetensi kelas jabatan dan persyaratan jabatan yang sesuai	Berkoordinasi dengan BKD mengenai kebutuhan pegawai serta memberdayakan tenaga Non PNS yang ada untuk membantu pelaksanaan program dan kegiatan

Sumber dana yang cukup dan dapat mendukung seluruh pelaksanaan program dan kegiatan	Tahun 2019 sumber dana dapat mencukupi dan mendukung seluruh pelaksanaan program dan kegiatan meskipun belum maksimal pada beberapa kegiatan terutama alokasi anggaran pada program prioritas	Masih membutuhkan sumber dana / anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan khususnya bagi program prioritas Kepala Daerah	Mengajukan permohonan penambahan anggaran ke BAPPEDA dan BPKD untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan utamanya program prioritas kepala daerah
Sarana dan Prasarana yang cukup dan memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan	Sarana dan Prasarana yang ada saat ini dapat dikatakan dalam jumlah yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan	Terdapat beberapa sarana dan prasarana seperti perangkat computer, printer, serta kendaraan yang tidak dalam kondisi yang baik sehingga butuh untuk dilakukan perbaikan atau pengadaan baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan untuk pengadaan perangkat computer, printer serta kendaraan operasional. 2. Mengusulkan anggaran pemeliharaan computer, printer serta kendaraan yang butuh untuk dilakukan perbaikan

1.15 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Tujuan dan Sasaram strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat tercapai melalui pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2019. Adapun capaian program dan kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7 Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1	Pengelolaan informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi selatan	Persentase pengelolaan komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah	Program 1. Program Pengembangan dan Implementasi e-Government	INDIKATOR PROGRAM : % Penerapan e-Government pada lingkup Perangkat Daerah	60 %	60 %
				1. Jumlah Jenis Kelengkapan Command Centre	1 Paket	1 Paket
				2. Jumlah Pembangunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optic (FO)	47 OPD	47 OPD
				3. Jumlah Kapasitas bandwidth Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	1. Tahap 1 : 250 MBps 2. Tahap 2 : 500 MBps	1. Tahap 1 : 250 MBps 2. Tahap 2 : 500 MBps
				4. Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Keras	1. Videotron : 1 Unit 2. Perangkat Keras : 8 Jenis	1. Videotron : 1 Unit 2. Perangkat Keras : 8 Jenis
5. Pembangunan / Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	50 Aplikasi	50 Aplikasi				

			6. Monitoring Layanan Infrastruktur Jaringan dan Bandwith Provinsi Sulawesi Selatan	38 Access Point	38 Access Point
			7. Pengembangan Sumber Daya e-Government	16 Orang	16 Orang
			8. Bimbingan Teknis Pengembangan Aplikasi	53 Orang	53 Orang
		Program 2. Pengembangan Baruga Layanan Aduan Masyarakat	INDIKATOR PROGRAM : % Pemanfaatan Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	100 %	100 %
			1. Pengembangan Baruga Layanan Aduan Masyarakat	2000 Aduan	2000 Aduan
			2. Pengelolaan konten dan berita website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	1700 Konten / Berita	1700 Konten / Berita
		Program 3. Pengelolaan Informasi Publik	INDIKATOR PROGRAM : % Layanan Konten Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Berkualitas Baik	70 %	70 %
			1. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	100 Sengketa	30 Sengketa
			2. Sosialisasi Regulasi dan Kualitas Layanan Informasi Publik	100 Peserta	100 Peserta

				3. Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas PPID	108 Orang	108 Orang
				4. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota
				5. Pengelolaan Informasi Publik	500 Informasi Publik	500 Informasi Publik
				6. Rumusan Kebijakan Teknis Daerah Terkait Layanan Yang Dikecualikan	1 Dokumen	1 Dokumen
				7. Monitoring dan Evaluasi PPID	4 Laporan	4 Laporan
				8. Pengembangan Sarana dan Prasarana PPID	1 Sistem	1 Sistem (Portal PPID)
				9. Pengembangan Sarana dan Prasarana Integrasi Sistem	1 e-Aplikasi	1 e-aplikasi
			Program 4. Pengelolaan Komunikasi Publik	INDIKATOR PROGRAM : % Komunitas Masyarakat / Mitra Strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	40 %	40 %

				% Desiminasi dan layanan informasi public yang dilakukan sesuai dengan strategi Komunikasi (STRAKOM)	40 %	40 %
				1. Peningkatan Sumber Daya Komunikasi	35 Orang	35 Orang
				2. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Komunikasi Publik	24 Laporan	24 Laporan
				3. Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Media	3 Media	3 Media
				4. Literasi Media Sosial	77 Orang	77 Orang
				5. Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik	2 Laporan	2 Laporan
				6. Gelar Aksi Pertunjukan Rakyat	1 Pertunjukan	1 Pertunjukan
				7. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Kab/Kota Prov Sulsel	24 Kab/Kota	24 Kab/Kota
				8. Pengelolaan isu public, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	2 Layanan	2 Layanan
2	Terwujudnya Integrasi Data Statistik Sektoral	Cakupan Ketersediaan data statistik sektoral	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	INDIKATOR PROGRAM : % Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi	43 %	43 %

			Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	40 %	40 %
			1. Penyusunan Validasi Data Output dan Interpretasi Output data statistic	4 Laporan	4 Laporan
			2. Pembangunan / Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu Data Statistik	1 Aplikasi	1 Aplikasi
			3. Pengembangan Infrastruktur Statistik	1 Aplikasi	1 Aplikasi
			4. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Data Statistik	6 Orang	6 Orang
			5. Bimbingan Teknis Penginputan Aplikasi Data Pokok Sektoral	1 Orang	1 Orang
			6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan	1 Laporan	1 Laporan
			7. Sinkronisasi antara data dengan metadata	2 Laporan	2 Laporan
			8. Membangun Implementasi rancangan Pengumpulan Data	45 OPD	45 OPD
			9. Pelaksanaan Pengumpulan Data OPD	1 Laporan	1 Laporan
			10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	4 Laporan	4 Laporan
			11. Integrasi Data, Klasifikasi Data, Penginputan Data dan Agregat Data Statistik Sektoral	1 Laporan	1 Laporan

3	Terwujudnya Fungsi Identifikasi, Proteksi, Penanggulangan dan Pemulihan di Bidang Keamanan Informasi yang Efektif dan Efisien	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Program Pemanfaatan Persandian dan Pengamanan Informasi	INDIKATOR PROGRAM :		
				% Komunikasi Daerah Yang Memanfaatkan Persandian	30 %	30 %
				1. Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Aset Informasi atau Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	47 Data OPD	
				2. Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan insiden Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	47 OPD	
				3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keamanan Informasi di Bidang Penanggulangan dan Pemulihan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Orang	
				4. Penetapan pola hubungan Komunikasi Sandi Intra Pemerintah Daerah	24 Kab/Kota	
				5. Implementasi dan Pengelolaan Sertifikat Elektronik Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi	100 Orang	
6. Penyusunan Peraturan Tentang Tata Kelola/Manajemen dan Prosedur Teknis	5 SOP					

				Operasional Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi		
				7. Pengelolaan Alat Pendukung Utama Persandian Yang digunakan Pemerintah Daerah	15 APU	
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan & Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Sakip OPD - Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) - % ASN Nilai SKP Kategori Baik 	Program 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	INDIKATOR PROGRAM : % Pemenuhan Administrasi Perkantoran	50 %	
				1. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	43 orang	43 Orang
				2. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	75 Jenis ATK	75 Jenis ATK
				3. Penyediaan Makanan dan Minuman	80 Jenis	80 Jenis
				4. Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	1 Pameran	1 Pameran
				5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	64 Kali	64 Kali
			Program 2. Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur	INDIKATOR PROGRAM : % Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 %	100 %
				1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Asrama	1 Unit	1 unit

				2. Pemeliharaan Rutin / Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan	22 Unit	22 Unit
				3. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24 Unit	24 Unit
				4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10 Unit	10 Unit
				5. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	2 Sistem	2 Sistem
			Program Peningkatan, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	<p align="center">INDIKATOR PROGRAM :</p> <p align="center">% Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja tepat waktu</p>	100 %	100 %
				1. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	155 orang	155 orang
				2. Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	1. Dokumen RKA dan DPA = 4 2. Dokumen Renja = 2 3. Dokumen Renstra = 1	1. Dokumen RKA dan DPA = 4 2. Dokumen Renja = 2 3. Dokumen Renstra = 1

					4. Dokumen Evaluasi PD = 4 Dokumen	4. Dokumen Evaluasi PD = 21 Dokumen
				3. Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	15 Laporan	15 Laporan
			Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	INDIKATOR PROGRAM : % ASN berkinerja sangat baik	100 %	100 %

1.16 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta pencapaian target rencana kinerja juga ditentukan oleh ketersediaan anggaran dimana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengelola dana APBD Tahun Anggaran 2019 yaitu pada Anggaran pokok sebesar **Rp 31.015.185.542,10** dan Anggaran Perubahan sebesar **Rp 30.932.162.700,18**. Realisasi Anggaran sebesar **Rp 30.573.795.860,00** dengan persentase **98,84 %** dengan sisa anggaran sebesar **Rp 358.366.840,18**. Uraian belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut.

Belanja Tidak Langsung :

- a. Rencana Kerja Anggaran SKPD
Besaran belanja tidak langsung pada Anggaran pokok Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp. 12.316.250.412,10** dan pada Anggaran Perubahan sebesar **Rp 10.939.818.983,00**.
- b. Pelaksanaan Anggaran
Realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar **Rp 10.927.156.933,00** atau **99,88 %**
- c. Sisa Anggaran
Sisa Anggaran pada Belanja tidak langsung adalah sebesar **Rp 12.662.050,00**.

Belanja Langsung :

- a. Rencana Kerja Anggaran SKPD
Besaran belanja langsung pada anggaran pokok adalah sebesar **Rp 18.698.935.130,00** dan Pada Anggaran Perubahan sebesar **Rp 19.992.343.717,18**.
- b. Pelaksanaan Anggaran
Realisasi anggaran belanja langsung sebesar **Rp 19.646.638.927,00** atau **98,27 %**
- c. Sisa Anggaran
Sisa Anggaran pada Belanja langsung adalah sebesar **Rp 345.704.790,18**

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.8 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI CAPAIAN RANGGARAN
1	Terwujudnya Fungsi Identifikasi, Proteksi, Penanggulangan dan Pemulihan di Bidang Keamanan Informasi yang Efektif dan Efisien	Persentase perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	314.417.600,00	288.560.693,00	91,78
2	Terwujudnya integrasi data statistik sektoral	Cakupan Ketersediaan data statistik sektoral	448.050.000,00	437.536.212,00	97,65
3	Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah	13.743.453.003,08	13.538.959.803	98,51
4	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) %ASN Nilai SKP Kategori Baik	5.486.423.114,1	5.381.582.219	98,08

Analisis Efisiensi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA %	PENYERAPAN ANGGARAN %	TINGKAT EFISIENSI %
1	Terwujudnya Fungsi Identifikasi, Proteksi, Penanggulangan dan Pemulihan di Bidang Keamanan Informasi yang Efektif dan Efisien	Persentase perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100 %	91,78 %	8,22 %
2	Terwujudnya integrasi data statistik sektoral	Cakupan Ketersediaan data statistik sektoral	100 %	97,65 %	2,34 %
3	Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah	100 %	98,51 %	1,49 %
4	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) %ASN Nilai SKP Kategori Baik	100 %	98,08 %	1,92 %



BAB 4

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023. Keberhasilan yang telah dicapai merupakan hasil dari kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan untuk target yang masih belum tercapai pada tahun ini perlu diantisipasi dan ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang.

Hasil Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari Analisis sasaran strategis perangkat daerah secara keseluruhan tahun Anggaran 2019 dapat disimpulkan bahwa seluruh realisasi sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah mencapai target yaitu sebesar 100 % dengan kriteria penilaian realisasi kinerja yaitu Sangat Baik.
2. Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun 2019 adalah sebesar **Rp 30.573.795.860,00** dengan persentase **98,84 %**.
3. Secara keseluruhan, pencapaian target pada tahun 2019 tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun masih terdapat beberapa permasalahan yang bisa menghambat peningkatan kinerja seperti Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki dan Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan meningkatkan kerja sama yang baik dengan media elektronik (radio dan televisi) dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi dan penerbitan / media cetak (surat kabar harian, tabloid, majalah dll) serta media luar ruang (Baliho, Spanduk dll)
2. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan public, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan public.

3. Pemantauan dan pengawalan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target setiap indikator kinerja yang diukur setiap triwulan.
4. Meningkatkan sinergi antar satuan kerja untuk mendorong tumbuhnya budaya kerja organisasi yang professional, akuntabel, mempunyai integritas dan inovatif
5. Melakukan perbaikan sistem dan pengelolaan manajemen kinerja, baik di tingkat organisasi maupun di tingkat individu, sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan secara terus menerus.